

**PELAKSANAAN FUNGSI PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA
(PLKB) DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PESERTA KB DI KELURAHAN
LANGGINI KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2011-
2012**

WULAN INDRAWATI

dan

Drs. ERMAN MUCHTAR, M.Si

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: wulanindrawati90@gmail.com

Abstract

The family planning program (kb) in urban village, sub-district and kampar bangkinang langgini family planning should be conducted by officers located in the organizational structure and work procedures of the local district kampar kampar is on the region regulation no. 6 / 2010. Officer for the family planning program is in office in the centre of the function of the article 106. The study is done in kelurahan langgini due to the lack of community participation for kb is the policy of the government the lack of the ability to communicate in the field of energy (plkb) in the socialization of family planning, and the social impact in understanding of cultural and religious family. It ' s a problem with the performance of the house why plkb in urban village to village / sub-district in langgini bangkinang kampar in 2011-2012 not run optimally.

The purpose of this research is to find out (plkb) on the implementation of the program participants, a member of the family, and know nothing of all constraints plkb job itself. The concept was a concept to be used by Edward III who suggested the concept of which there are four things which are important in communication resources, the disposition and the bureaucracy.

Based on the results of the research at this skripsi the authors conclude that it is not enough to lack the officer for the family planning program by the government is keikutsertaan to join kb program in the community. And advice as one who is in the improvement of co-operation between harapannya to the public to support the officer for the family planning program(kb).

Keywords: implementation, participation, and public policy.

Pendahuluan

Menurut undang-undang RI No.10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, pasal 1 ayat 10, disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Perkembangan Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) yang demikian cepatnya, menuntut suatu kondisi pelayanan yang harmonis dan berkualitas, terutama yang menyangkut untuk menciptakan kondisi pelayanan yang harmonis dan berkualitas sangat ditentukan oleh pola yang sesuai dengan proses kegiatan itu sendiri.

Pertumbuhan penduduk yang pesat merupakan akibat dari kelahiran yang tinggi. Semua itu akan menjadi sumber utama kemiskinan dan juga bisa menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi. Dampak dari kondisi ini akan meningkatkan beban Pemerintah dalam penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti penyediaan pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, transportasi dan lain sebagainya yang menyangkut dengan kebutuhan masyarakat.

Keluarga Berencana (KB) mempunyai tujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga serta mewujudkan norma kecil keluarga bahagia dan sejahtera (NKKBS). Kedudukan PLKB/PKB dalam organisasi BKKBN merupakan tugas lapangan yang berkedudukan di Kecamatan dengan wilayah tugas di Desa/Kelurahan atau disebut dengan wilayah kerja PLKB/PKB, dan bertanggung jawab langsung kepada kepala BKKBN kabupaten dan atau kepala BKKBN kota, sedangkan secara administrasi berada di bawah pengawasan PLKB Kecamatan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada kepala Desa/Kelurahan.

Tugas BKKBN Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor 111 /HK . 010/C1/1993 Pasal 103 kantor BKKBN Kabupaten/Kotamadya mempunyai tugas selanjutnya dan menetapkan kegiatan gerakan KB Nasional, menyelenggarakan pengelolaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera dan mengkoordinasi pelaksanaannya, mengembangkan dan menetapkan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat, serta menyelenggarakan secara terpadu bersama instansi terkait diwilayah Kabupaten/Kotamadya.

Rumusan Masalah

Program Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah sangat penting untuk dilaksanakan. Dengan adanya Program Keluarga Berencana akan memberi dampak yang baik terhadap kehidupan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dan juga pelaksanaan program Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Petugas Penyuluh Keluarga Berencana di Kecamatan Bangkinang merupakan tugas yang harus dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di paparkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Mengapa implementasi kinerja PLKB dalam Keluarga Berencana di Desa/Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar tahun 2011-2012 tidak berjalan dengan optimal?

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang telah di rumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1.1 Untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam usaha peningkatan peserta KB.
- 1.2 Untuk mengetahui kecenderungan peningkatan peserta KB.
- 1.3 Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan Fungsi PLKB.

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian adalah :

- 2.1 Memberi masukan dan meningkatkan kinerja Pemerintah dan para Penyuluh Keluarga Berencana dalam menjalankan program Keluarga Berencana, khususnya Pemerintah Kabupaten Kampar.
- 2.2 Sebagai bahan informasi bagi peneliti dalam mengkaji dan menganalisa pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Kampar.
- 2.3 Sebagai informasi dan data bagi pembaca yang ingin memahami dan meneliti dari kajian yang sama.

Metode Penelitian

1. Lokasi

Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Penulis memilih lokasi penelitian di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang di karenakan (1) Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang adalah salah satu Kelurahan/Kecamatan yang partisipasi masyarakatnya dalam ber-KB sangat rendah. (2) kinerja PLKB masih kurang optimal.

2. Data yang digunakan

2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dapat di peroleh secara langsung dari responden di lapangan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah yang sudah di rumuskan dalam penelitian ini. Data yang di butuhkan dalam penelitian ini mengenai pelaksanaan fungsi PLKB dalam keluarga meningkatkan jumlah peserta KB Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012. Meliputi tanggapan responden yaitu kantor BKKBN Bangkinang, bagian yang mengelola KB dan KS, Kantor Camat Bangkinang, Kantor Desa/Kelurahan Langgini dan masyarakat sebagai pelaksana KB melalui wawancara.

2.2 Data sekunder

Data sekunder ini merupakan sumber data tertulis yang bisa di peroleh melalui dokumen atau arsip, laporan maupun buku peraturan perundang-undangan. Dengan demikian data sekunder tidak secara langsung di peroleh dari hasil penelitian. Survey sekunder yang di lakukan adalah dengan mencari data sekunder antara lain:

1. Profil Desa/Kelurahan Langgini,
2. Keadaan penduduk Desa/Kelurahan Langgini,
3. Keadaan sarana dan prasarana PLKB,
4. Uraian tugas pokok dan fungsi PLKB,
5. Struktur Organisasi BKKBN.

3. Sumber Data

3.1 Informan

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan yang benar-benar memahami tujuan yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini serta memiliki posisi penting di instansi bersangkutan.

4. Cara Memperoleh Data

Cara yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

4.1 Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung kepada responden terpilih secara mendalam yaitu kepada aparat kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Kampar, aparat kantor Kelurahan Langgini dan aparat Kantor Camat Bangkinang.

4.2 Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, serta terhadap objek yang akan diteliti.

4.3 Penelusuran Dokumen/Arsip/

Study kepustakaan, yaitu studi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang berguna dalam perumusan teoritis dan landasan untuk analisis data primer, serta menelaah data melalui literatur yang tersedia, baik dari karya ilmiah dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek dan masalah penelitian.

Analisa Data

Setelah semua data yang diperlukan diperoleh baik data primer maupun data sekunder dari lokasi penelitian, kemudian di klasifikasikan sesuai dengan jenis data, di olah dan di analisis secara kualitatif kemudian di lakukan analisis secara deskriptif dengan jalan menggambarkan keadaan tentang kinerja petugas lapangan keluarga berencana di Desa/Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang dan menguraikan secara seksama hasil temuan-temuan penelitian secara jelas dan singkat.

Hasil dan Pembahasan

A. Kontek Kebijakan Penyuluhan KB

Konteks kebijakan Keluarga Berencana secara keseluruhan berbeda secara signifikan pada masa Orde Baru dengan masa setelah Orde Baru. Program KB pada masa lalu (orde baru) mengalami masa keemasan, kejayaan dan merupakan icon dari delapan sukses program pembangunan. Jika seorang pejabat ingin sukses dalam berkarir, ingin cepat naik jabatan, dan ingin terkenal, ingin diakui sebagai keder pembangunan, maka pijakan, kendaraannya adalah mensukseskan program KB di daerahnya. Program KB ada dimana-mana pada setiap saat dan waktu, baik di media masa, elektronik, dan media ruang serta menjadi bahan obrolan yang menyegarkan dan pembicaraan yang tidak pernah habis-habisnya dan guyonan yang menyegarkan.

Analisis Dampak Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan program Keluarga Berencana (KB) di era kepemimpinan Presiden Soeharto berhasil.

Pada zaman Orde Baru, program Keluarga Berencana (KB) dijadikan sebagai alat ukur kesuksesan kepala daerah dalam membangun desanya, dengan menekan tingkat rasio kependudukan.

Di Kelurahan Langgini penyuluhan KB pada masa orba (orde baru) ini sangat berhasil. Bawasannya pada saat Pak Soeharto menjadi Presiden KB ini adalah program Pemerintah. Kita telah mengetahui bagaimana Pak Presiden Soeharto disaat menjabat itu, hampir semua program berhasil termasuk KB ini yang memiliki semboyan yaitu “dua anak lebih baik”.Jumlah pertumbuhan penduduk yang bisa dapat diatur pada saat itu.

Untuk menganalisa sampai sejauh mana keterlibatan petugas penyuluh KB pada masa Orba di Kelurahan Langgini serta dukungan Pemerintah dan keterlibatan Tokoh/ Kultur, maka terlebih dahulu penulis beberkan batasan keterlibatan dan dukungan dalam pelaksanaan GKBN.

Seperti program pembangunan lainnya bahwa penanggung jawab umum dalam pelaksanaan Gerakan KB di daerah adalah Kepala Daerah yang bersangkutan, hal ini karena selaku pemegang dan pelaksana Undang – undang No. 5 tahun 1974.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam pelaksanaan Gerakan KB Nasional khususnya pada masa orba dilakukan koordinasi fungsional yang dilaksanakan secara vertikal dan horizontal antara satu instansi yang lain, juga antara Pemerintah dan Organisasi swasta, profesi dan masyarakat.

Adanya dukungan Politik Penyuluhan, dukungan Pemerintah maupun pendekatan Tokoh formal maupun informal hal ini dilakukan dalam GKBN karena sebuah instansi tidak mungkin menyelenggarakan tugasnya tanpa bantuan dan dukungan instansi organisasi profesi serta masyarakat lainnya, maka dalam pelaksanaan GKBN di Kelurahan Langgini berikut ini akan dibeberkan pelaksanaan dan penanggung jawab GKBN pada masa Orba sebagai berikut :

1. Dukungan Politik Penyuluhan Keluarga Berencana

Dukungan Politik Penyuluhan pada saat itu ditangani oleh suatu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)dengan urusan mengadakan distribusi alat kontrasepsi (Alkon) ketempat pelayanan umum serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan jalan KIE.

2. Dukungan Struktur (Pemerintah)

Dukungan Struktur (Pemerintah) selalu pimpinan Daerah (Geburnur, Camat, Kepala Daerah/ Lurah) sebagai pelaksana teknis politis di wilayah masing – masing. Sedangkan Pengawas PLKB dan PKB sebagai pelaksana fokus operasional di masing – masing wilayah secara fungsional bertanggung jawab pada kepala wilayah (Camat, Kades/ Lurah).

Rumah Sakit Umum (RSU), Puskesmas selaku pelaksana teknis pelayanan kontrasepsi bertanggung jawab pada Departemen dan Dinas Kesehatan dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.

3. Pendekatan Sosial dan Budaya

Pendekatan Kultur (Tokoh) pada institusi masyarakat yang berada ditingkat Desa/ Kelurahan baik Tokoh Formal maupun Informal ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam mendistribusikan alat kontrasepsi. Sehingga pada masa orba Program KB benar – benar dirasakan keberadaannya.

Undang – undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mengutamakan bahwa kepedulian dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga kecil bahagia sejahtera perlu terus ditingkatkan.

Upaya meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dapat disalurkan melalui lembaga swadaya dan organisasi masyarakat (LSDM), pihak swasta dan perorangan serta institusi masyarakat lain secara sukarela dan mandiri sesuai dengan kemampuan masing – masing.

B. KONTEN KEBIJAKAN PENYULUHAN KB

Salah satu tujuan Program Keluarga Berencana adalah untuk mengendalikan jumlah pendudukan dari kelahiran dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan kualitas keluarga. Dalam hal penyelenggaraan Program Keluarga Berencana, pemerintah telah menetapkan kebijakan, diantaranya membantu para calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan untuk menentukan usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah anak ideal yang dimiliki dan jarak ideal kelahiran anak serta menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.

Globalisasi dan reformasi menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan kerja yang sangat mendasar yang menyangkut demokratisasi (pemerintahan yang bersih, adanya keterbukaan, penanggung jawaban kepada publik, otonomi daerah, dan kepastian hukum) hak azazi manusia, dan lingkungan hidup.

Sebagai konsekuensi dari tuntutan tersebut Program KB Nasional harus mampu memosisikan diri sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat, terutama dalam menjamin kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang lebih baik, serta mampu menghargai hak reproduksi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Disamping itu program KB nasional harus dapat menempatkan masyarakat sebagai pelalui utamanya.

Sejak KB dijadikan sebagai program Nasional pada tahun 1970, peran petugas lapangan KB telah ikut memberikan kontribusi terhadap pelembagaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta terwujudnya keluarga berkualitas pada tahun 2015. Dengan adanya perubahan tersebut yang dirinya pula dengan makin menurunnya komitmen, baik politis maupun operasional dalam pelaksanaan Program KB Nasional. Oleh karena itu keberadaan Petugas di daerah dalam melaksanakan tugasnya makin dituntut untuk mampu melaksanakan tugas – tugas Pemerintah yang lebih professional dan tidak hanya berkaitan dengan tugas penyelenggaraan Program KB Nasional, tetapi juga menyangkut program pembangunan lain yang ditugaskan oleh PEMDA.

Maka dari itu Petugas Penyuluhan Keluarga Berencana mempunyai tugas yang sudah disebutkan pada bab I yaitu :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan KB Nasional di tingkat Kecamatan.
- b. Pembantu Tehnis Camat dalam Pelaksanaan dan pengendalian Gerakan KB Nasional. Yang dimaksud pembantu tehnis Camat adalah membantu Camat sebagai penanggung jawab Gerakan KB Nasional di wilayah Kecamatan.
- c. Penyebarluasan ide Gerakan KB Nasional ditingkat Kecamatan.
- d. Penggerak masyarakat ditingkat Kecamatan dalam pelaksanaan Gerakan KB Nasional. Yang dimaksud dengan penggerak masyarakat adalah menggerakkan tokoh formal, tokoh informal, institusi masyarakat dan keluarga-keluarga untuk berperan aktif dalam Gerakan KB Nasional.
- e. Penggalangan kemitra kerja di tingkat Kecamatan. Yang dimaksud dengan penggalangan kemitraan kerja adalah mengidentifikasi, mengajak, membina kerjasama dengan petugas dari instansi-instansi lain, pengusaha dan swasta, agar mereka memberi dukungan dalam pelaksanaan Gerakan KB Nasional di wilayah kerja.

Berdasarkan tugas yang telah disebutkan di atas sekarang petugas penyuluhan keluarga berencana pada masa orde baru dengan sekarang sangat berbeda. Karena masyarakat pada masa orde baru sangat besar partisipasinya dalam program Pemerintah ini yaitu KB. Sedangkan pada masa sekarang masyarakat sangat kurang dalam berpartisipasi program yang telah dibuat oleh Pemerintah. Banyak berbagai alasan masyarakat untuk kurang berpartisipasi program Pemerintah ini yaitu program KB.

Di Kelurahan Langgini Program KB ini berjalan dengan baik sesuai dengan Pemerintah inginkan. Walaupun di daerah Langgini terdapat beberapa hambatan, sedangkan pada masa sekarang masyarakat agak males-malesan dalam mengikuti Program Pemerintah. Di karena kan pada saat Penyuluhan petugas dalam menyampaikan penyuluhan tersebut sangat membosankan dan masih banyak berbagai alasan masyarakat dalam tidak mengikuti seminar-seminar yang dilakukan oleh BKKBN.

C. Faktor – faktor Penyebab rendahnya keikutsertaan dalam ber-KB di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang tahun 2011.

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Berdasarkan dari hasil survey BPS, jumlah penduduk Pekanbaru dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Maka program KB yang ditawarkan oleh Pemerintah adalah salah satu cara Pemerintah untuk mengatasi terhadap lajunya perkembangan penduduk, yang salah satu sasaran programnya adalah meningkatkan keikutsertaan dalam program KB.

Ruang lingkup kehamilan yang tidak direncanakan menurut *World Health Report 2005* "Make every mother and child count" :

- 40% kehamilan di dunia tidak direncanakan.
- 22% Berakhir dengan aborsi yang diinduksi.

Dengan demikian adanya kebutuhan yang besar yang tidak terpenuhi untuk layanan Keluarga Berencana yang efektif.

Faktor resiko kematian Ibu :

- Terlalu muda melahirkan
- Terlalu sering melahirkan
- Terlalu rapat melahirkan
- Terlalu tua melahirkan

Keluarga Berencana :

- Merupakan hak asasi manusia
- Menyelamatkan hidup wanita, menjaga kesehatannya
- Menyelamatkan hidup anak-anak
- Memberikan lebih banyak pilihan untuk wanita
- Mendorong penerapan perilaku seks aman

KB dapat dipahami sebagai, suatu program untuk mengurangi populasi penduduk, karena diasumsikan pertumbuhan populasi penduduk tidak seimbang dengan ketersediaan barang dan jasa. Dalam pengertian ini, KB di dasarkan pada teori populasi menurut Thomas Robert, dalam *An Eassay on the Principle of Population*, Malthus membuat ramalan yang terkenal bahwa jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan, yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang. Ia bahkan meramalkan secara spesifik bahwa hal ini pasti akan terjadi pada pertengahan abad ke-19, sebuah ramalan yang gagal karena beberapa alasan.

KB dalam pengertian pertama ini diistilahkan dengan (Pembatasan Kelahiran).

1. KB dapat dipahami sebagai aktivitas individual untuk mengatur kehamilan dengan berbagai cara dan sarana (alat). Misalnya dengan kondom, IUD, pil KB, dan sebagainya. KB dalam pengertian kedua diberi istilah (pengaturan kelahiran).

2. Hadist Nabi SAW yang artinya : kawinilah wanita yang subur dan penuh kasih sayang, karena akhir nanti Bangsa akan banyaknya kamu atas umat-umat yang lain(HR.Abu Daud, Ahmad, dan Hakim).

Hadist diatas bukan berarti memberikan kebebasan mutlak untuk memperbanyak anak tanpa perencanaan. Karena, dalam pandangan islam, jangankan memiliki banyak, seseorang yang belum memiliki kemampuan justru dianjurkan untuk memperbanyak puasa.

KB dalam arti pengaturan kelahiran, yang dijalankan oleh individu untuk mengatur kelahiran dengan berbagai cara dan sarana.

Manfaat KB terhadap kesehatan Ibu dan Anak.

1. Terpeliharanya kesehatan Ibu dan anak, terjaminnya keselamatan ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, menyusui dan memelihara anak serta timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga.

2. Terpeliharanya kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan dan perawatan yang baik bagi anak.

3. Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang dibebani kewajiban mencakupi kebutuhan hidup keluarganya.

Sosialisasi ataupun penyuluhan tentang KB telah dilaksanakan di Desa/Kelurahan ini.namun tetap saja masih sulitnya meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap KB.

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dapat dipahami :

1. Seorang ayah sebagai kepala rumah tangga wajib bertanggung jawab atas kesetaraan istri dan anak.

2. Seorang ibu tidak boleh menderita karena anaknya, demikian pula ayahnya dan ahli warisnya.

3. Perintah menyusui anak selama dua tahun yang bisa berakibatkan tidak menstruasi sehingga dia tidak dapat hamil, mengindasikan bahwa harus ada pengaturan jarak kelahiran.

4. Pengaturan kehamilan / kelahiran tersebut harus didasarkan pada prinsip musyawarah antara suami dan istri.

Metode / alat Kontrasepsi dan Hukum penggunaannya

Ada 5 (lima) persoalan yang terkait dengan penggunaan alat kontrasepsi, yaitu :

1. Cara kerjanya, apakah mencegah kehamilan atau menggugurkan kehamilan

2. Sifatnya, apakah ia hanya pencegah kehamilan sementara atau bersifat pemandulan permanen.

3. Pemasangannya, bagaimana dan siapa yang memasang alat kontrasepsi tersebut. Hal ini berkaitan dengan masalah hukum melihat aurat orang lain.

4. Implikasi alat kontrasepsi terhadap kesehatan penggunanya.

5. Bahan yang digunakan untuk membuat alat kontrasepsi tersebut.

Alat kontrasepsi yang dibenarkan menurut islam, adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan, bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat di pasang sendiri oleh yang bersangkutan atau boleh orang lain yang tidak haram memandang auratnya atau oleh orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia

dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan komplikasi yang membahayakan bagi kesehatan.

Alat / metode kontrasepsi yang tersedia saat ini telah memenuhi kriteria – kriteria tersebut diatas, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa KB secara substansial tidak bertentangan dengan ajaran islam bahkan merupakan salah satu bentuk Implementasi semangat ajaran islam dalam rangka mewujudkan sebuah kemasyarakatan, yaitu menciptakan keluarga yang tangguh, mawaddah, sakinah dan penuh rahmat.

Manfaat ber-KB

A. Apa yang dimaksud dengan dalam upaya untuk :

1. Mewujudkan keluarga Berencana.

Keluarga Berencana adalah upaya untuk mewujudkan hak reproduksi serta penyelenggara pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal.

2. Mengatur jumlah, jarak dan usia idealnya melahirkan anak.

3. Mengatur kehamilan.

4. Membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

B. Manfaat dari ber-KB

Bagi ibu-ibu

✓ Mencegah anemia.

Kandungan zat besi yang ada pada salah satu kontrasepsi PIL Kombinasi. Dapat resiko Anemia gerak sehingga dengan berKB ibu dapat menjaga kesehatan Fisik dan Kesehatan Reproduksi dengan lebih optimal.

✓ Mencegah pendarahan yang terlalu banyak setelah persalinan.

Dengan berKB setelah melahirkan, seorang ibu dapat mencegah pendarahan yang terlalu banyak setelah melahirkan dan mempercepat pulihnya kondisi Kesehatan rahim.

✓ Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Merencanakan dan mengatur kelahiran anak-anaknya dengan menghindari 4 terlalu ini akan menurunkan resiko kesehatan dan kematian ibu.

✓ Mendekatkan itu terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan

✓ Meningkatkan keharmonisan keluarga.

Mempunyai waktu yang cukup luang dalam memperhatikan kebutuhan suami, melayani suami dengan penuh kemesraan tanpa rasa takut menjadi hamil, waktu yang cukup untuk merawat dan mendidik anak dengan baik.

Bagi anak-anak :

✓ Mencegah kurang gizi.

Memberikan peluang bagi ibu dalam mempersiapkan kehamilannya agar janin yang kandung mendapat asupan Gizi yang sempurna.

✓ Tumbuh kembang Anak Terjamin.

Pengaturan jarak kehamilan member peluang kepada setiap anak untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih optimal dan menjadi generasi yang berkualitas.

✓ Kebutuhan Asi Eksklusif selama 6 bulan.

Terpenuhnya ber-KB dengan pemberian Asi secara Eksklusif selama 6 bulan, dikenal dengan MAL (Methode Amenore Laktas) akan memberikan kesempatan pada bayi untuk mendapatkan gizi yang paling sempurna yang terkandung di dalam ASI.

C. Ekonomi

- Mengurangi Biaya Kebutuhan Rumah Tangga.
- Dapat meningkatkan atau menambah pendapatan Keluarga. Khususnya bagi ibu yang mempunyai peluang yang besar untuk berusaha.

D. Sosial Budaya

- Meningkatkan Kesempatan bermasyarakat dengan ber-KB ibu memiliki kesempatan dan waktu yang lebih banyak untuk bersosialisasi dan aktif pada kegiatan social dimasyarakat.
- Meningkatkan peran ibu dalam pengambilan keputusan keluarga baik keputusan dalam rumah tangga sendiri. Seperti memilih kontrasepsi, menentukan jumlah anak yang dikehendaki maupun keputusan diluar rumah tangga.

Program Keluarga Berencana adalah merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran. Guna mencapai laju pertumbuhan yang ideal, pelaksanaan program keluarga berencana (KB) sangat membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih intensif agar tingkat kesadaran dan keikutsertaan masyarakat dalam KB dapat meningkat yang pada gilirannya dapat menurunkan angka kelahiran dan pada akhirnya mampu menekan laju pertumbuhan penduduk.

D. Faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaan Tugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang.

Dalam rangka kepedulian pemerintah terhadap kehidupan masyarakat, yang salah satunya adalah dengan dilaksanakannya program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS).

Dalam mewujudkan program keluarga berencana tersebut, maka dalam pelaksanaannya diperlukan aparatur pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah dan desa. Dan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana di tingkat pedesaan, khususnya di desa- desa dalam wilayah Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang di perlukan peran serta Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) guna terwujudnya program Keluarga Berencana tersebut.

Pelaksanaan program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang, yang mana dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat desa tidak begitu optimal dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan banyak faktor – faktor. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan keluarga berencana oleh petugas keluarga berencana oleh petugas PKB di antaranya adalah :

1. Terbatasnya tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana di Desa / Kelurahan Langgini.
2. Partisipasi masyarakat yang kurang dalam mengikuti Program Keluarga Berencana. Dimana Desa / Kelurahan Langgini masyarakatnya masih ada yang beranggapan banyak anak banyak rezeki.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan. Tempat penyuluhan yang diadakan oleh petugas keluarga berencana tidak ada tempat khusus, hanya pada waktu diadakan bersamaan dengan kegiatan Posyandu dan dari rumah ke rumah.

Dari ketiga faktor penghambat dalam pelaksanaan program keluarga berencana yang dijalankan oleh petugas penyuluh keluarga berencana, untuk itu diharapkan adanya suatu kerja sama yang baik, agar pelaksanaan program keluarga berencana dapat terwujud dengan baik, sesuai harapan pemerintah, dan menciptakan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga, individu, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta. Maka dari itu, pria juga mempunyai kesempatan yang sama dengan wanita dalam pengendalian penduduk. Yang mana jika perkembangan penduduk dapat terkendali, maka kualitas pendudukpun juga dapat diperhatikan. Jika penduduknya berkualitas, maka setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik lagi.

Berdasarkan dari masalah-masalah inilah penulis meneliti tentang Pelaksanaan Fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam meningkatkan jumlah peserta KB di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar 2011-2012. Yang mana pelaksanaan program ini kurang berjalan maksimal dikarenakan masih kurang penuhnya dukungan baik dari Pemerintah, instansi-instansi terkait maupun masyarakat. Mengenai informasi yang ada yaitu KB terkadang tidak sampai ke telinga masyarakat itu sendiri. Sehingga masyarakat juga kesulitan mendapatkan pengetahuan. Sosialisasinya seharusnya lebih banyak lagi. Jadi bukan hanya dibutuhkan kesadaran dari masyarakat nya saja, namun pemerintah dan instansi terkait juga harus optimal mensosialisasikan ataupun mempromosikan tentang KB ini.

Jadi dikatakan berhasil apa tidaknya program KB ini, tergantung pada orang-orang yang berkaitan didalam maupun yang menjadi sasaran dari program ini. Berdasarkan dari hasil penelitian, KB yang di lakukan oleh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Dalam Meningkatkan Jumlah Peserta KB Di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2011-2012, dapat disimpulkan berikut ini.

1. Program KB ini atau disebut juga Gerakan Keluarga Berencana Nasional (GKBN) pada masa Orde Baru dan Pasca Orde Baru sangat berbeda. Pada saat Orde Baru Program KB yang di programkan Pemerintah ini bisa dikatakan berhasil sedangkan pada Pasca Orde Baru KB menjadi program yang tidak lagi menjadi prioritas di jalankan oleh pemerintah. Apalagi paska diberlakukannya otonomi daerah.
2. Rendahnya kemampuan berkomunikasi tenaga pelaksana di tingkat lapangan (PKB) dalam memberikan penyuluhan tentang permasalahan KB.
3. Adanya pengaruh social, budaya, maupun agama dalam pemahaman tentang KB.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, saran – saran yang dapat dijadikan perbaikan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh PLKB sebagai berikut :

1. Agar Program pemerintah KB ini berjalan/ berhasil seperti pada masa Orde Baru Pemerintah harus lebih bekerja keras lagi untuk menjalankan program ini.

2. Untuk memperlancar program Keluarga Berencana hendaknya Pemerintah Daerah melalui Pemerintah Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap, agar program KB dapat terlaksana sebagai mana yang diharapkan oleh Pemerintah.
3. Diharapkan kepada Petugas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana dan masyarakat harus bisa saling lebih dapat bekerja sama dalam mendukung keberhasilan program Keluarga Berencana.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- BKKBN, *Pedoman Pembinaan Peran PLKB dalam Program KB Nasional*, Jakarta, 2002.
- BKKBN, *Pedoman Tata Cara Kerja Pengawas PLKB dalam Gerakan Keluarga Berencana*, 1999.
- BKKBN, *Pedoman Tata Cara Kerja Pengawas PLKB dalam Gerakan Keluarga Berencana*, 2000.
- BKKBN, *Pedoman Pembinaan bagi penyuluh ditingkat lini lapangan*, Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1996.
- BKKBN, *Pedoman Pembinaan bagi penyuluh ditingkat lini lapangan*, Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN, 1998.
- BKKBN, *Bina Keluarga*, Jakarta, 1991.
- BKKBN, *Bina Keluarga*, Jakarta, 1993.
- BKKBN, *Bina Keluarga*, Jakarta, 1992.
- BKKBN, *Bina Keluarga*, Jakarta, 1994.
- BKKBN, *Bina Keluarga*, Jakarta, 2004.
- BKKBN, *Rancangan Perencanaan Pembangunan Dalam BerKB*, Jakarta, 1998.
- Leo Agustino, *Ilmu Politik*, Graha Ilmu.
- Leo Agustino S.sos.,M.si, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung : CV Alfabeta.
- Loeman Sutrisno, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Saifuddin, Abdul Bari. 2006. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Sastropoetra,R,A, Santoso. *Partisipasi komunikasi persuasi dan disiplin dalam pembangunan Nasional*, Alumni, bandung, 1996.
- Sastropoetra,R,A, Santoso. *Partisipasi komunikasi persuasi dan disiplin dalam*

pembangunan Nasional, Alumni, Bandung, 1998.

Soetrisno, Loekman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Penerbit Kanisius.
Yogyakarta.

Dokumen :

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012.

UUD 1945

Skripsi :

Malaysia Kinerja Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Di Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar.

Poppy Indah Implementasi Program Keluarga Berencana Medis Operasi Pria (Mop) Di
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Tahun 2011.

Media Online :

“http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Langgini,_Bangkinang,_Kampar&oldid=4272350

[http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/07faktor-faktor yang mempengaruhi.](http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/07faktor-faktor%20yang%20mempengaruhi.html#ixzz2BXIvTUmv)

[html#ixzz2BXIvTUmv](http://jurnalbidandiah.blogspot.com/2012/07faktor-faktor%20yang%20mempengaruhi.html#ixzz2BXIvTUmv).